

2026



KATA PENGANTAR



Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Tahun 2026 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, dan menjadi bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2030, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2025 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, Oktober 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Drs. DARMAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670803 198809 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum..... 2

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

 1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN
III 6

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
 Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik Triwulan III
 Tahun 2025..... 6

 2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 11

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
 Daerah 13

 2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi-Fungsi
 Pelayanan Perangkat Daerah..... 13

 2.3.2 Dampak terhadap Visi, Misi, Bupati Terhadap Capaian Program
 Nasional..... 16

 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 19

 2.4.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program
 dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan 24

 2.4.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 24

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 45

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH..... 54

 3.1 KERANGKA PENDANAAN 54

 3.1.1 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja 55

 1.1.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan 80

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 85

 4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 85

 4.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 87

 4.3 Program dan Kegiatan 90

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 92

BAB VI PENUTUP..... 98

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 7

Tabel 2. 2 (T-C.30) 11

Tabel 2. 3 (T-B 35) 14

Tabel 2. 4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD ... 15

Tabel 2. 5 Teori Perumusan Penjelasan Visi 16

Tabel 2. 6 ANALISIS SWOT 20

Tabel 2. 7 (Tabel T-C.31) 22

Tabel 2. 8 (Tabel T-C.32) 46

Tabel 3. 1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Kabupaten Gresik.....66

Tabel 3. 2 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Kabupaten Gresik 78

Tabel 3. 3 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik 80

Tabel 3. 4 Proyeksi Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 81

Tabel 3. 5 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik 83

Tabel 4. 1 Arah Kebijakan Nasional/Provinsi.....85

Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pola Siklus Bisnis 52

Gambar 3. 2 Siklus Bisnis Pendapatan Asli Daerah 53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dalam urusan koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan Review Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 memuat uraian tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2026 sebagai bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026. Selain itu, Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 juga diselaraskan dengan rancangan awal Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2026, Kementerian Perindustrian Tahun 2026, Kementerian Perdagangan Tahun 2026, Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, serta Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Jawa Timur Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program yang tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sekaligus menjadi dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026. Dokumen ini disusun secara sistematis dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renja PD yang telah disusun akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun

2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan disusun dengan maksud menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan disetiap bidang dalam satu tahun anggaran dan sebagai dasar evaluasi serta pengendalian kinerja tahunan guna menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah:

1. Menetapkan arah, kebijakan, serta prioritas program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sektor koperasi, perindustrian, dan perdagangan agar selaras dengan visi misi kepala daerah;
3. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan koperasi, UMKM, industri kecil, dan menengah, serta sistem perdagangan yang sehat dan berdaya saing;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan
Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN APBD TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Triwulan III Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026 yang mengacu pada APBD tahun 2026 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Triwulan III Tahun 2025.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Menggambarkan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025-2029;

serta uraian secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, pagu indikatif/pendanaan perangkat daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisikan arah dan fokus pembangunan tahunan yang memuat tujuan terukur, indikator kinerja, target capaian, serta program prioritas untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini berisikan rumusan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, serta kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik Triwulan III Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026. Berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik mendapatkan pagu Rp 13.666.232.777,56 diperuntukkan sebanyak 3 urusan 12 program 17 kegiatan dan 28 sub kegiatan.

Dalam rangka mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 68.148.001.417. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan meliputi 3 urusan, 12 program, 17 kegiatan, dan 31 sub kegiatan dengan realisasi triwulan I sebesar Rp 2.583.276.179,87; realisasi triwulan II sebesar Rp 5.165.961.291,74; dan realisasi triwulan III sebesar Rp 12.064.887.074.

Capaian kinerja Triwulan III TA 2025 tersebut, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2026, agar target capaian indikator sampai dengan tahun terakhir Rencana Strategis dapat tercapai. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2. 1 Hasil Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025

No.	Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub (Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 2021 s/d 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021 s/d 2025)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.					
					K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K			Rp.	K		Rp.	
					Vol	Satuan		vol	satuan		vol			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		vol	%		vol	%		vol				%	vol		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12	14= 13/8x100	15= 7+13	16= 15/6x100	17	18																			
	2.17.2.17		DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			87.096.556.442,78		64.143.816.004	67.997.519.397	2.583.276.178,87	2.582.685.113	6.898.925.782,28	12.064.887.074																							
	2.17.2.17.3.30.301.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100	%	62.496.655.009,30	100	%	40.596.205.247	100	11.512.598.569	30	2.531.682.479		2.338.804.063		2.126.239.836,28	30	6.996.726.378																
	2.17.2.17.3.30.1.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90	Dokumen	138.138.548,89	38	Dokumen	78.110.282	18	20.000.000	4	6.230.000		-		-	4	6.230.000	22,22	31,15	31,15	42	84.340.282	46,67	4,51	Sekretariat								
	2.17.2.17.3.30.1.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	875	Laporan	110.410.400,82	177	Laporan	66.491.615	175	15.089.544	0	-		-	30	975.600,00	30	975.600	17,14	6,47	6,47	207	67.467.215	23,66	0,88	Sekretariat								
	2.17.2.17.3.30.1.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	430	Orang/Bulan	45.557.984.234,67	92	Orang/Bulan	30.430.282.855	86	8.932.944.724	3	1.946.610.921	3	1.927.047.808	3	1.527.929.510,28	9	5.401.588.239	10,47	60,47	60,47	101	35.831.871.094	23,49	11,86	Sekretariat								
	2.17.2.17.3.30.1.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	755	Laporan	110.512.321,09	150	Laporan	59.981.775	151	5.000.000	15	499.900	15	492.300	15	1.058.600,00	45	2.050.800	29,80	41,02	41,02	195	62.032.575	25,83	1,86	Sekretariat								
	2.17.2.17.3.30.1.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75	Paket	1.381.346.279,07	30	Paket	364.660.619	15	47.327.875	0	-	5	14.632.464	5	17.050.805,00	10	31.683.269	66,67	66,94	66,94	40	396.343.888	53,33	2,29	Sekretariat								
	2.17.2.17.3.30.1.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	552.488.009,57	21	Paket	201.490.546	12	30.826.900	2	2.254.000	2	5.888.582	4	5.804.500,00	8	13.947.082	66,67	45,24	45,24	29	215.437.628	48,33	2,52	Sekretariat								
	2.17.2.17.3.30.1.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	530	Paket	552.562.931,60	11	Paket	226.582.026	21557	34.000.000	500	300.000	250	487.500		-	750	787.500	3,48	2,32	2,32	761	227.369.526	143,58	0,14	Sekretariat								
	2.17.2.17.3.30.1.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang 0 undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	Dokumen	82.641.340,98	4	Dokumen	24.666.000	12	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	4	24.666.000	16,00	0,00	Sekretariat									
	2.17.2.17.3.30.1.2.06.08.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	235	Laporan	82.828.521,73	40	Laporan	20.824.000	25	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	40	20.824.000	17,02	0,00	Sekretariat									
	2.17.2.17.3.30.1.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347	Laporan	1.105.120.724,37	105	Laporan	151.055.693	69	55.539.994	28	10.622.380	15	3.311.000		-	43	13.933.380	62,32	25,09	25,09	148	164.989.073	42,65	1,26	Sekretariat								
	2.17.2.17.3.30.1.2.08.0002.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa pelayananKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	12	bulan	71.017.600,00	12	bulan	57.250.541	12	71.017.600	3	11.803.874	2	14.201.799	2	12.474.496,00	7	38.480.169	58,33	54,18	54,18	19	95.730.710	158,33	54,18	Sekretariat								
	2.17.2.17.3.30.1.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	Laporan	11.938.651.106,93	22	Laporan	8.475.117.391	10	2.194.979.432	3	538.503.040	3	355.308.360	3	533.462.540,00	9	1.427.273.940	90,00	65,02	65,02	31	9.902.391.331	310,00	11,96	Sekretariat								
	2.17.2.17.3.30.1.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40	Unit	607.789.460,95	57	Unit	312.356.664	8	85.410.000	2	14.858.364	2	14.241.250	2	26.050.685,00	6	55.150.299	75,00	64,57	64,57	63	367.506.963	157,50	9,07	Sekretariat								
	2.17.2.17.3.30.1.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	270	Unit	276.181.128,63	58	Unit	127.335.240	54	20.462.500	0	-	10	3.193.000	20	1.433.100,00	30	4.626.100	55,56	22,61	22,61	88	131.961.340	32,59	1,68	Sekretariat								
Rata 0 rata capaian kinerja (%)													96,22			34,65			78,50	7,30																
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi			Sangat Rendah						Tinggi	Sangat Rendah										

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

2.17.2.17.3. 30.303.	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A		66.35%(420 koperasi)	736.288.319,58	65.60%(410 koperasi)	35%(420 koper-	244.118.102		15.306.725		6.903.500		96.000		947.529.500,00	-	954.529.000																							
2.17.2.17.3.3 0.303.2 .01.01.		Pengawasan Kekuatan, Kemampuan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemampuan, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	525	Unit Usaha	598.148.477,69	100	Unit Usaha	219.788.779	0	-	0		-		-	-	0,00	0,00	0,00	100	219.788.779	19,05	0,00	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro																	
2.17.2.17.3.3 0.303.2 .01.0004.		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30	Unit Usaha	20.000.000,00	30	Unit Usaha	10.529.400	30	15.306.725	2	6.903.500	5	96.000	12	947.529.500,00	19	954.529.000	63,33	6236,01	6236,01	49	965.058.400	163,33	4772,65	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro															
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																				63,33		6236,01			60,79	1590,88																
Predikat Kinerja																				Rendah		Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi																
2.17.2.17.3. 30.304.	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	48.49%(354 kop		552.561.152,35	44.38%(324 kop)	8.49%(354 kop	253.469.790		61.403.258		-		-		33.077.200,00	-	33.077.200						5,99																	
2.17.2.17.3.3 0.304.2 .01.01.		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	200	Unit Usaha	276.280.402,12	80	Unit Usaha	98.488.370	30	17.464.095	-	-		-	15	2.327.200,00	15	2.327.200	50,00	13,33	13,33	95	100.815.570	47,50	0,84	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro															
2.17.2.17.3.3 0.304.2 .01.02.		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	30	Unit Usaha	276.280.750,23	6	Unit Usaha	113.284.420	0	-	-	-	-		-	-	-	0,00	0,00	0,00	6	113.284.420	20,00	0,00	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro																
2.17.2.17.3.3 0.304.2 .01.0003.		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	9	Unit Usaha	43.939.163,00	9	Unit Usaha	41.697.000	9	43.939.163	-	-	-	-	6	30.750.000,00	6	30.750.000	66,67	69,98	69,98	15	72.447.000	166,67	69,98	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro															
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																				25,00		27,77			78,06	23,61																
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah		Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah																
2.17.2.17.3. 30.305.	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih					-	90.585.400		-		-		-			-																								
2.17.2.17.3.3 0.305.2 .01.01.		Peningkatan Pemahaman dan Pengalaman Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	500	Orang	46.500.000	0	Orang	90.585.400	0	-	0	-		-		0,00	0	-	0,00	0,00	0,00	0	90.585.400	0,00	0,00	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro															
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00																
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																
2.17.2.17.3. 30.306.	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	% Pertumbuhan Omzet Koperasi		2.74% (Rp. 110.000.000,0 00)	2.297.689.282,16	2.68% (Rp. 105.000.000. 000)	(Rp. 110.000.000	-	0	-	0	-		-			-	-						-																	
2.17.2.17.3.3 0.306.2 .01.01.		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	665	Unit Usaha	2.297.689.282,16	133	Unit Usaha	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	133	-	20,00	0,00	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro															
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																				0,00	0,00	0,00			20,00	0,00																
Predikat Kinerja																				Sangat Bangah	Sangat Bangah	Sangat Rendah			Sangat Bangah	Sangat Rendah																

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

2.17.2.17.3.30.307.	Meningkatnya Usaha Mikro	PROGRAM PEMERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro dengan akses permodalan		0.12%(200 Usaha Mikro)	1.562.922.079,89	0.12%(200 Usaha Mikro)	%200 Usaha Mikro	25.528.482.937		3.424.811.783		32.543.000		210.784.400		1.221.935.600,00	-	1.465.263.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
---------------------	--------------------------	---	--	--	------------------------	------------------	------------------------	------------------	----------------	--	---------------	--	------------	--	-------------	--	------------------	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

3.30.2.17.3. 30.304.	Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)		menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	2.426.423.173,51	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	340.211.160			70.000.000		2.620.000		2.727.000		9.486.000,00	-	14.833.000																		
3.30.2.17.3.3 0.304.2 .02.02.		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	36	Laporan	287.608.609,26	72	Laporan	215.769.160	24	70.000.000	5	2.620.000	5	2.727.000	10	9.486.000,00	20	14.833.000	83,33	21,19	21,19	92	230.602.160	255,56	5,16	Kabid. Perdagangan										
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																				83,33	21,19	21,19													85,19	1,72	
Predikat Kinerja																				Tinggi		Sangat Rendah													Tinggi	Sangat Rendah	
3.30.2.17.3. 30.305.	Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	% Pertumbuhan nilai ekspor		2.32% (1.542.587,40 7,84 USD)	782.151.943,05	2,03% (1.587.587,40 87,84 USD)	1.542.587.407,84	235.837.670		30.500.000		-		-		14.389.400,00	-	14.389.400																		
3.30.2.17.3.3 0.305.2 .01.04.		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5	Pelaku Usaha	782.151.943,05	2	Pelaku Usaha	235.837.670	2	30.500.000	-	-		-	1	14.389.400,00	1	14.389.400	50,00	47,18	47,18	3	250.227.070	60,00	1,84	Kabid. Perdagangan										
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																				50		47,18													60,00	1,84	
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah		Sangat Rendah													Rendah	Sangat Rendah	
3.30.2.17.3. 30.306.	Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTPP berterra sah		97,34%(3800 UTPP)	2.127.367.589,20	97,34%(3800 UTPP)	34%(3800 UTPP)	913.040.616		84.532.100		6.880.000,00		6.570.000,00		8.979.500,00	-	22.429.500																		
3.30.2.17.3.3 0.306.2 .01.01.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Uang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Pengalangan Ditera Uang	17500	Unit	1.851.086.468,75	7.000	Unit	832.030.300	3800	66.368.400	100	6.360.000	1.500	5.910.000	1500	7.539.500,00	3.100	19.809.500	81,58	29,85	29,85	10100	851.840.008	57,71	1,07	Sekretaris										
3.30.2.17.3.3 0.306.2 .01.02.		Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	17500	Orang	276.281.120,45	7.000	Orang	81.010.108	200	18.163.700	5	520.000	50	660.000	55	1.440.000,00	110	2.620.000	55,00	14,42	14,42	7110	83.630.108	40,63	0,95	Sekretaris										
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																				68,29	22,14	22,14													49,17	1,01	
Predikat Kinerja																				Sedang		Sangat Rendah													Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.31.2.17.3. 30.302.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dengan memacu produktifitas perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase IKM yang terdata dan terbina		0,84% (60 IKM)	484.044.689,60	0,70% (50 IKM)	0,84% (60 IKM)	403.216.841		21.253.674.975	-			14.150.000,00		2.078.658.325,00	-	2.092.808.325																		
3.31.2.17.3.3 0.302.2 .01.05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	Dokumen	-	-	Dokumen	70.032.750	2	21.200.500.000	-	-	1	600.000,00	0,5	2.073.158.325,00	2	2.073.758.325	75,00	9,78	9,78	2	2.143.791.075	75,00	0,00	Kabid. Perindustrian										
3.31.2.17.3.3 0.302.2 .01.03.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	53.174.975	1	Dokumen	147.124.546	20	53.174.975	-	-	10,0	13.550.000,00	5	5.500.000,00	15	19.050.000	75,00	35,83	35,83	16	166.174.546	1600,00	35,83	Kabid. Perindustrian										
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																				75,00	22,80	35,83													837,50	17,91	
Predikat Kinerja																				Sedang		Sangat Rendah													Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

3.31.2.17.3. 30.303.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Prosentase IKM yang mendapat fasilitas		1,35% (95 IKM)	882.663.838,57	1,30% (92 IKM)	1,35% (95 IKM)	407.097.360		31.263.857		-		1.510.000,00		378.500,00	-	1.888.500																						
3.31.2.17.3.3 0.303.2 .01.01.		Facilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	890	Dokumen	882.663.838,57	178	Dokumen	377.637.910	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	178	377.637.910	20,00	0,00	Kabid. Perindustrian																	
3.31.2.17.3.3 0.303.2 .01.0004.		Facilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	6	Dokumen	31.263.857,00	6	Dokumen	29.459.450	10	31.263.857	-	5	1.510.000,00	3	378.500	8	1.888.500	80,00	6,04	6,04	14	31.347.950	233,33	6,04	Kabid. Perindustrian														
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																				80,00		6,04														126,67	3,02			
Predikat Kinerja																				Tinggi		Sangat Rendah														Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
3.31.2.17.3. 30.304.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas		0,99% (3 IKM)	636.994.107,42	0,31 (3 IKM)	0,99% (3 IKM)	147.275.182		29.169.849		-		5.500.000,00		6.262.000,00	-	11.762.000																						
3.31.2.17.3.3 0.304.2 .01.02.		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	150	Dokumen	636.994.107,42	150	Dokumen	117.668.992	0	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	150	117.668.992	100,00	0,00	Kabid. Perindustrian														
3.31.2.17.3.3 0.304.2 .01.03.		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5	Dokumen	29.169.849,00	5	Dokumen	29.606.190	15	29.169.849	-	-	10	5.500.000,00	2	6.262.000,00	12	11.762.000	80,00	40,32	40,32	17	41.368.190	340,00	40,32	Kabid. Perindustrian													
0																				80,00	20,16	40,32														220,00	20,16			
Predikat Kinerja																				Tinggi		Sangat Rendah															Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
TOTAL RATA 0 RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ke 14)																				17,70		27,15																127,68	125,19	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ke 14)																				Sangat Rendah		Sangat Rendah																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel **T-C.30** sebagai berikut:

Tabel 2. 2 (T-C.30)

**Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Prosentase Koperasi Aktif	-	-	44.17% (625 koperasi)	44.11% (633 koperasi)	44.12 (642 koperasi)	44.20% (642 koperasi)	44.35% (663 koperasi)	51.17% (790 Koperasi)	49.70% (755 Koperasi)	51.17% (790 Koperasi)	52,01% (815 Koperasi)	-
2	Pertumbuha n Usaha Mikro	-	-	0.09% (150 UM)	0.10% (175 UM)	0.10% (175 UM)	0.10% (175 UM)	0.10% (175 UM)	1.92% (1.165 Usaha Mikro)	1.08% (1.859 Usaha mikro)	1.92% (1.165 Usaha Mikro)	33,81% (20.911 Usaha Mikro)	-
3	Pertumbuha n nilai Neraca Perdaganga n	-	-	0.03% 1.481.78 4.855.09 US \$	0.04% 1.546.784 .855.09 US \$	0.05% 1.621.784 .855.09 US \$	0.05% 1.621.784 .855.09 US \$	0.05% 1.621.784 .855.09 US \$	-35.17% (1.483.3 90.516,5 8 USD)	0.06% 2.288.229 .997.55 USD	-35.17% (1.483.39 0.516,58 USD)	33,34% (492.124.825, 87 USD)	-
4	Pertumbuha n IKM	-	-	0.79% (7389 IKM)	0.81% (7449 IKM)	0.83% (7511 IKM)	0.87% (7576 IKM)	0.92% (7.716 IKM)	(0.79%) 7389 IKM	0.81% 7.450 ikm	1.02 % (7.511 IKM)	1,14% (7.597 IKM)	-

Dari hasil capaian diatas dapat disimpulkan bahwa hampir semua indikator pencapaian kinerja pelayanan tercapai dari target yang ditetapkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tidak terlepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan. Berbagi masalah maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan terkait dengan perumusan kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi-Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk badan untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pemetaan permasalahan berdasarkan penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, yakni :

Tabel 2. 3 (T-B 35)
Pemetaan Permasalahan berdasarkan Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Rendahnya daya saing UMKM	Produk UMKM sulit menembus pasar nasional/internasional	- Kurangnya inovasi dan kualitas produk - Minimnya pelatihan manajemen usaha - Akses pembiayaan modal terbatas
2	Terbatasnya infrastruktur industri	Kawasan industri belum optimal	- Kurangnya investasi pemerintah dan swasta - Tidak adanya perencanaan tata ruang industri yang matang
3	Distribusi dan perdagangan belum efisien	Harga barang pokok berfluktuasi	- Lemahnya pengawasan distribusi - Ketergantungan pada pedagang besar - Rantai pasok panjang
4	Koperasi tidak aktif atau tidak sehat	Banyak koperasi tidak melaksanakan RAT	- Manajemen lemah - Pengawasan dinas belum optimal - Rendahnya partisipasi anggota

Penentuan isu – isu strategis Perangkat Daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan dan hasil evaluasi kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan serta tantangan eksternal baik dari lokal / bersifat kedaerahan maupun nasional bahkan internasional, mengingat Kabupaten Gresik merupakan kota industri terbesar kedua di Indonesia. Isu strategis merupakan kondisi/keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan demografi, ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 2.4 demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Tabel 2. 4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan PD)	(Diluar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Analisis Gambaran Pelayanan PD	Rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap kewajiban menggunakan Sistem Informasi Industri Nasional	IKK	- Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang penggunaan SIINAS kepada pelaku IKM - Pendampingan dan fasilitasi pendaftaran IKM ke dalam SIINAS	- Pelatihan, edukasi, dan pendampingan digitalisasi industri - Mitra sosialisasi kebijakan industri pemerintah	Kurangnya sosialisasi dan pendampingan penggunaan SIINAS

	(SIINAS)				
	Masih terdapat kendala akses informasi pasar dan regulasi tujuan ekspor	IKK	- Pelatihan dan sosialisasi regulasi ekspor bagi pelaku UMKM/IKM - Fasilitasi keikutsertaan IKM dalam pameran dagang, misi dagang didalam maupun luar negeri	- Kolaborasi bank swasta atau lembaga pembiayaan untuk dukungan pembiayaan dan pelatihan ekspor	- Terbatasnya akses pelaku UMKM/IKM terhadap informasi pasar global dan regulasi ekspor
Hasil Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi	Penumbuhan Kinerja Industri Kecil Menengah		Rendahnya kinerja Industri Kecil Menengah	Kebijakan perindustrian dan perizinan belum berpihak pada IKM; proses birokrasi yang rumit	Kebijakan dan regulasi yang belum mendukung
	Penumbuhan eksportir		Rendahnya pertumbuhan eksportir baru	Akses ke lembaga pembiayaan ekspor masih terbatas bagi usaha kecil; risiko pembayaran luar negeri tidak terlindungi	Terbatasnya fasilitas pembiayaan dan asuransi ekspor

2.3.2 Dampak terhadap Visi, Misi, Bupati Terhadap Capaian Program Nasional

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Gresik akan dibawa untuk berkarya agar konsisten sehingga dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang

dianut oleh seluruh komponen *stakeholder* yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

**“MERWUJUDKAN GRESIK BARU
YANG LEBIH MANDIRI, SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN
BERKEMAJUAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH ”**

Secara filosofi, Visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok Visi pembangunan sebagaimana berikut:

Tabel 2. 5 Teori Perumusan Penjelasan Visi

No.	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
1.	Gresik yang lebih Mandiri	Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga

- mewujudkan kemandirian daerah.
2. Gresik Sejahtera yang Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.
 3. Gresik yang Berdaya Saing Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda

- yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.
4. Gresik yang Berkemajuan Berkemajuan yang Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.
 5. Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah yang Berlandaskan Akhlakul Karimah Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan

keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan Misi Kabuapten Gresik 2021-2026 yaitu:

Misi 1 :

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif.

Misi 2 :

Membangun infrastruktur yang berdaya saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota

Misi 3 :

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah.

Misi 4 :

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Kharimah.

Misi 5 :

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan dasar Masyarakat Gresik.

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik masuk pada Misi ke-3 Kabupaten Gresik yaitu **'Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah** dengan Tujuan ke 3 yaitu **'Menguatkan Pembangunan Perekonomian Grcsik Baru yang Inkluslf'** dan indikator kinerjanya yaitu : **Pertumbuhan Ekonomi** Sedangkan sasaran Kabupaten Gresik yang menaungi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yaitu sasaran ke- 6 yaitu : **'Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah'** dengan indikator kinerja yaitu **Indeks Williamson** yang merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam lima tahun ke depan dianalisis melalui metode SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats). Perumusan analisis SWOT tantangan dan peluang Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindsutrian dan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 2. 6 ANALISIS SWOT
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Gresik

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
KEKUATAN / STRENGTHS (S)	PELUANG / OPPRTUNITIES (O)
- Memiliki kewenangan strategis dalam pembinaan sektor koperasi, IKM, dan perdagangan daerah - Adanya SDM aparatur yang berpengalaman dibidang teknis (koperasi, perindustrian, dan perdagangan) - Adanya program unggulan pembinaan UMKM dan pengembangan sentra industri - Jaringan kemitraan dengan instansi pusat dan lembaga keuangan daerah - Struktur organisasi sudah mencakup bidang-bidang teknis yang mendukung pelayanan publik	- Dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan UMKM dan industri daerah - Perkembangan teknologi digital membuka peluang pemasaran online dan ekspor digital bagi pelaku usaha - Potensi kemitraan dengan sektor swasta, BUMN, dan perguruan tinggi untuk program pelatihan, riset, dan promosi - Adanya kerjasama antar daerah dan peluang ekspor - Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal dan ekonomi kreatif
KELEMAHAN / WEAKNES (W)	ANCAMAN / THREATS (T)
- Keterbatasan anggaran pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha - Masih rendahnya digitalisasi layanan dan sistem informasi internal - SDM belum merata dari sisi kompetensi teknologi dan pelayanan publik - Koordinasi antar bidang masih lemah, menyebabkan tumpang tindih program - Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (pusat layanan, fasilitas pameran, laboratorium uji mutu, dll)	- Persaingan produk impor dan dominasi industri besar menekan keberlangsungan IKM lokal - Ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga bahan baku - Perubahan kebijakan pusat yang cepat belum diimbangi dengan kesiapan daerah - Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban legalitas dan pelaporan - Dampak bencana, pandemi, atau krisis global terhadap rantai pasok dan konsumsi masyarakat

2.4.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Perumusan program kegiatan diprioritaskan untuk mendukung program Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan yang merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2021-2026. Untuk Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan mengemban Nawa Karsa ke 1 yaitu:

GRESIK AKAS dengan satu output kunci Perijinan UMKM tuntas ditingkat kecamatan yang didukung 3 program yaitu :

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

GEMA KARYA dengan dua output kunci :

1. 3b (Bela, Beli, Bagi) Gresik didukung 2 program yaitu :
 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Program Pengembangan Eksport.

3 One Pesantren one produk (OPOP) didukung 2 program yaitu:

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);

2.4.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD yang diusulkan oleh **Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan** Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdapat 12 program dan 17 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 67.997.519.396,89,-

Berikut disajikan review terhadap rancangan RKPD tahun 2025 untuk
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik pada tabel **Tabel T-C.31** sebagai berikut :

Tabel 2. 7 (Tabel T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				12.194.864.252,00	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				13.795.000.000,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi , Usaha Kecil, dan Menengah				12.194.864.252,00	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan				13.795.000.000,00	
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%	11.194.694.252,00	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%	11.995.000.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Seluruh Dokumen Perencanaan dan Monev	20 Dokumen	65.000.000,00	Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Seluruh Dokumen Perencanaan dan Monev	18 Dokumen	80.000.000,00	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	30.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	40.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	35.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	40.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pembayaran Pemenuhan Administrasi Keuangan Dinas	86 Dokumen	8.298.554.652,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pembayaran Pemenuhan Administrasi Keuangan Dinas	86 Dokumen	8.515.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	8.283.554.652,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	8.500.000.000,00	

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	4 Laporan	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	4 laporan	15.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	7 Dokumen	420.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	10 Paket	700.000.000,00	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No .	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	150.000.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	250.000.000,00	
	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistic Kantor yang Disediakan	10 Paket	80.000.000,00	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistic Kantor yang Disediakan	10 Paket	150.000.000,00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	80.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	100.000.000,00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	15.000.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	25.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	15.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	25.000.000,00	

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	80.000.000,00	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	150.000.000,00	
--	---	--	---	---------------	---------------	---	--	---	------------	----------------	--

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Pelayanan yang Terbayar	10 Pembayaran	2.266.139.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Pelayanan yang Terbayar	4 laporan	2.400.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	119.039.600,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	2.200.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	2.147.100.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	2.200.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemeliharaan Seluruh Sarana dan Prasarana Dinas	62 pemeliharaan	145.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemeliharaan Seluruh Sarana dan Prasarana Dinas	6 unit	300.000.000,00	

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 unit	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 unit	200.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	45.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	100.000.000,00	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Jumlah Koperasi Aktif Grade B, C1, C2, dan D menjadi Koperasi Aktif Grade A	440 Koperasi	40.000.000,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Jumlah Koperasi Aktif Grade B, C1, C2, dan D menjadi Koperasi Aktif Grade A	440 Koperasi	150.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi	115 Koperasi	40.000.000,00	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi	30 unit usaha	150.000.000,00	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 unit usaha	40.000.000,00	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 unit usaha	150.000.000,00	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Jumlah KSP/USP Koperasi yang Dinilai Kesehatannya	414 koperasi	150.000.000,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Jumlah KSP/USP Koperasi yang Dinilai Kesehatannya	414 koperasi	300.000.000,00	

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi Sehat	60 koperasi	150.000.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi Sehat	60 unit usaha	300.000.000,00	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	60 unit usaha	50.000.000,00	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	60 unit usaha	150.000.000,00	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No .	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	9 unit usaha	100.000.000,00	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	9 unit usaha	150.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Pertumbuhan Omzet Koperasi	2.83%	410.170.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Pertumbuhan Omzet Koperasi	2.83%	500.000.000,00	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Dibina	139 koperasi	410.170.000,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Dibina	30 unit usaha	500.000.000,00	

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Rstrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 unit usaha	410.170.000,00	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Rstrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 unit usaha	500.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Usaha Mikro dengan Akses Permodalan	0.12%	150.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Usaha Mikro dengan Akses Permodalan	0.12%	350.000.000,00	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No .	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Usaha Mikro yang Diberdayakan	250 usaha mikro	150.000.000,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Usaha Mikro yang Diberdayakan	1000 dokumen	350.000.000,00	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1000 dokumen	50.000.000,00	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1000 dokumen	100.000.000,00	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	150 usaha mikro	50.000.000,00	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perizinannya	150 unit usaha	150.000.000,00	

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	259 unit usaha	50.000.000,00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	259 unit usaha	100.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Pertumbuhan Usaha Mikro	1.46%	250.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Pertumbuhan Usaha Mikro	1.46%	500.000.000,00	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Statusnya	30 usaha mikro	250.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah Usaha Mikro yang meningkatkan statusnya	75 unit usaha	500.000.000,00	
	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	75 unit usaha	250.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	75 unit usaha	250.000.000,00	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.655.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.550.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.305.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.850.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	100%	700.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	100%	1.700.000.000,00	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		jumlah pemeliharaan sarana dan prasaran pasar	8 pemeliharaan	600.000.000,00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		jumlah pemeliharaan sarana dan prasaran pasar	9 unit	1.500.000.000,00	

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 unit	600.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 unit	1.500.000.000,00	
--	---	--	--	--------	----------------	---	--	--	--------	------------------	--

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pembinaan Pedagang	3922 pedagang	100.000.000,00	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pembinaan Pedagang	3 dokumen	200.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 dokumen	100.000.000,00	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 dokumen	200.000.000,00	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	325.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	500.000.000,00	

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		jumlah komoditi yang di input dalam https://siskaperbapo.com dalam rangka pemantauan harga bahan pokok dan lainnya	28 bahan pokok	325.000.000,00	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		jumlah komoditi yang di input dalam https://siskaperbapo.com dalam rangka pemantauan harga bahan pokok dan lainnya	2 laporan	500.000.000,00	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2 laporan	325.000.000,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2 laporan	500.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		% Pertumbuhan nilai ekspor	2.84%	100.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		% Pertumbuhan nilai ekspor	2.84%	250.000.000,00	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Mikro dan IKM yang mengikuti Misi dagang	5 UM/IKM	100.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Mikro dan IKM yang mengikuti Misi dagang	5 pelaku usaha	250.000.000,00	
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 pelaku usaha	100.000.000,00	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 pelaku usaha	250.000.000,00	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat UTPP berterrasah	97.34%	180.000.000,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat UTPP berterrasah	97.34%	400.000.000,00	

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah UTTP yang ditera sah	3500 UTTP	180.000.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah UTTP yang ditera sah	3500 unit	400.000.000,00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah alat ukur, alat talar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	3500 Pelaksanaan	150.000.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah alat ukur, alat talar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	3500 unit	350.000.000,00	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	2500 orang	30.000.000,00	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	2500 orang	50.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				350.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				700.000.000,00	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Prosentase IKM yang terdata dan terbina	1.1%	150.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Prosentase IKM yang terdata dan terbina	1.1%	250.000.000,00	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang terdata	80 IKM	150.000.000,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang terdata	44 dokumen	250.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkroniasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkroniasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	44 dokumen	150.000.000,00	Koordinasi, Sinkroniasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkroniasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	44 dokumen	150.000.000	

	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi	1,43%	100.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi	1,43%	250.000.000,00	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang mengajukan Merk dan Halal	104 IKM	100.000.000,00	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang mengajukan Merk dan Halal	6 dokumen	250.000.000,00	

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan atau Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Best Approach (OSS RBA)		Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan atau Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk bidang usaha sector perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah – tinggi, dan tinggi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan OSS RBA, bagi penanamna modal dalam negeri (PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	6 dokumen	100.000.000,00	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan atau Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Best Approach (OSS RBA)		Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan atau Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk bidang usaha sector perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah – tinggi, dan tinggi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan OSS RBA, bagi penanamna modal dalam negeri (PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	6 dokumen	250.000.000,00	
--	---	--	--	-----------	----------------	---	--	--	-----------	----------------	--

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Prosentase IKM ber KBLL kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	1.24%	100.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Prosentase IKM ber KBLL kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	1.24%	200.000.000,00	
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM ber KBLL kategori industri yang mengajukan verifikasi teknis melalui SIINas	15 IKM	100.000.000,00	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM ber KBLL kategori industri yang mengajukan verifikasi teknis melalui SIINas	25 dokumen	200.000.000,00	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	25 dokumen	100.000.000,00	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	25 dokumen	200.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel **T-C.32** sebagai berikut:

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Tabel 2. 8 (Tabel T-C.32)
Usulan Proram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Gresik Nama Perangkat Daerah: Dinas
Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rek.			Program /Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				-
2	17		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100 %	-
2	17		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah seluruh dokumen perencanaan dan monev	20 dokumen	-
2	17	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis dokumen yang di cetak	18 jenis dokumen	-
2	17	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen monev yang dicetak	175 buku	-
2	17		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-
2	17	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah jabatan pns yang terfasilitasi pembayaran gaji dan tunjanganya	86 orang	-
2	17	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen pelaporan yang dicetak	151 buku	-
2	17		Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	7 administrasi	-
2	17	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	jumlah pengadaan perlatan/perlengkapan kantor/rumah tangga	15 pengadaan	-
2	17	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	-
2	17	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-
2	17	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	5 jenis bahan bacaan	-
2	17	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan sovenir/talih asih dinas	47 paket	-
2	17	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah perjalanan dinas dalam jumlah perjalanan luar daerah	26 kali 43 kali	-
2	17		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-
2	17	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	jumlah pembayaran jasa pelayanan	10 jenis pembayara	-
2	17		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jumlah pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana dinas	62 pemeliharaan	-

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

2	17	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pemeliharaan kendaraan	5 kendaraan	-
			Jabatan	Kelurahan			-
2	17	09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pemeliharaan peralatan pendukung kerja	54 unit	-
2	17		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A	66.98 %	-
2	17		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang diperiksa & diawasi	110 kopera	-
2	17	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	110 koperasi	-
2	17		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase jumlah KSP/USP Kperasi yang dinilai kesehatannya	52.60 %	-
2	17		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang di nilai	50 Koperasi	-
2	17	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koperasi Sehat	50 koperasi	-
2	17	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan	15 koperasi	-
2	17		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Pertumbuhan Omzet Koperasi	2.79 %	-
2	17		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yg di bina	130 Koperasi	-
2	17	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang difasilitasi usahanya	136 koperasi	-
2	17		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha mikro dengan akses permodalan	0.12 %	-
2	17		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Usaha mikro yang diberdayakan	250 UM	-
2	17	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usaha mikro yang terdata	500 Usaha mikro	-
2	17	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perizinannya	50 Usaha mikro	-
2	17	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 Usaha Mikro	-
2	17		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Pertumbuhan Usaha Mikro	1.35 %	-
2	17		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah Usaha Mikro yang meningkat statusnya	30 UM	-
2	17	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usaha mikro yang berdaya saing	70 Usaha Mikro	-
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				-
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				-

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

3	30		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				-
3	30		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				-
3	30	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pasar kabupaten dan sentra pkl yang di pelihara	8 pemeliharaan	-
3	30		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah pembinaan pedagang	3922 pedagang	-
3	30	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pedagang pasar dan sentra pkl yang terfasilitas	1338 stand	-
3	30		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	inflasi 3 %	-
3	30		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		jumlah komoditi yang di input dalam https://siskaperbapo.co dalam rangka pemantauan harga bahan pokok dan lainnya	28 bahan pokok	-
3	30	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan pokok yang diinput di aplikasi Siskaperbapo	36 bahan pokok	-
3	30		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Pertumbuhan nilai ekspor	2.59 %	-
3	30		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Mikro dan IKM yang mengikuti Misi dagang	5 UM/IKM	-
3	30		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pelaksanaan misi dagang daerah	1 misi dagang	-
3	30		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat UTTP berterra sah	97.34 %	-
3	30		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah UTTP yang diterra sah	3000 UTTP	-
3	30	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan tera dan terra ulang	3500 pelaksanaan	-
3	30	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah UTTP yang diawasi	3500 UTTP	-
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				-
3	31		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Prosentase IKM yang terdata dan terbina	0,98 %	-
3	31		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang terdata	70 IKM	-
3	31	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah IKM yang dibina	70 IKM	-
3	31		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi	1,39 %	-
3	31		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang mengajukan Merk dan Halal	150 IKM	-
3	31	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah IKM yang mendapatkan sosialisasi terkait Merk dan Halal	150 IKM	-
3	31		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	0,93 %	-
3	31		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM ber KBLI kategori industri yang mengajukan verifikasi teknis melalui SIINas	151 IKM	-

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

3	31	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi SIINas	150 IKM	-
---	----	----	---	--	---	---------	---

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan periode 2021-2026 melandasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung- iawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Kerangka pendanaan pada periode 2021-2026 dirumuskan dalam APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Belanja Daerah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja operasi; Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas:
 - (1) Belanja pegawai;
 - (2) Belanja barang dan jasa;
 - (3) Belanja bunga;
 - (4) Belanja subsidi;
 - (5) Belanja hibah; dan
 - (6) Belanja bantuan sosial
- b. Belanja modal; Belanja merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi
- c. Belanja tidak terduga; dan Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - (1) Belanja bagi hasil;
 - (2) Belanja bantuan keuangan.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gresik pada periode 2021-2026 sangat dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang berpengaruh secara massig terhadap perekonomian global dan Indonesia. Perlambatan perekonomian Indonesia pada Tahun 2020 telah diperkirakan oleh berbagai lembaga dunia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3

persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4 – 2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97 %, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu.

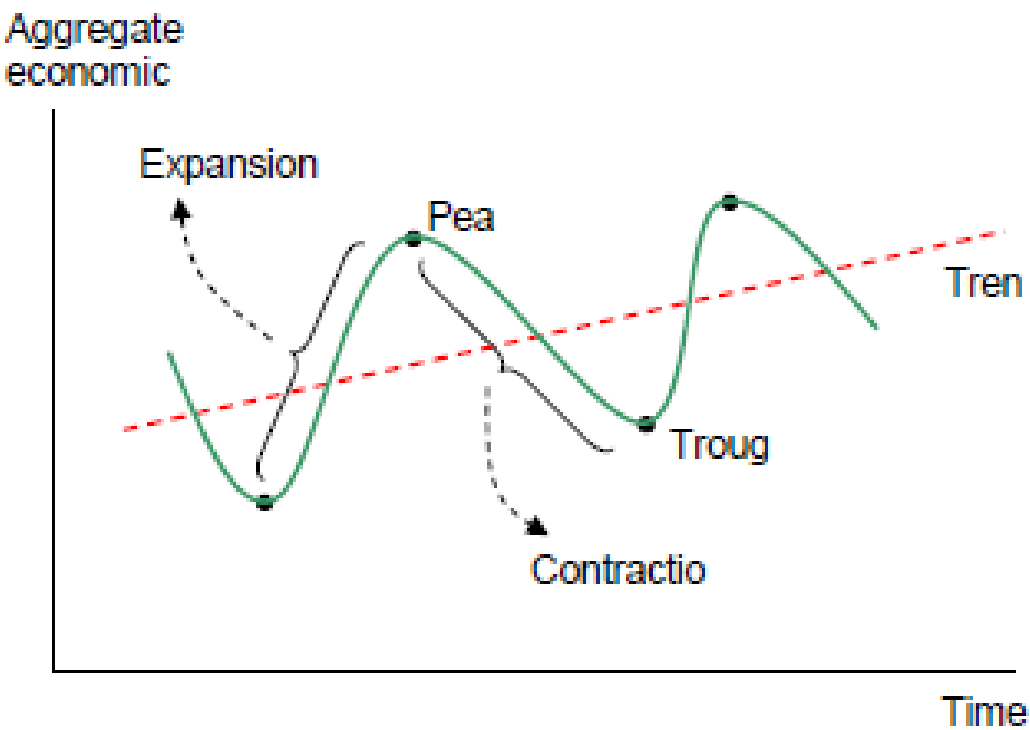
Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. SMERU Research Institute, lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian publik, pada Agustus 2020 merilis catatan kebijakan mereka yang berjudul "Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi COVID-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan". Dalam catatan itu, tim riset SMERU menggarisbawahi setidaknya ada dua implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan jumlah pengangguran, dan kedua, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca-krisis.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan yang melambat sebesar 2.97% pada Tahun 2020 yang semula pada Tahun 2019 mampu tumbuh sebesar 5,41%. Hal ini diakibatkan adanya pengaruh pandemi global yang membuat kondisi perekonomian mengalami resesi dengan pendapatan daerah yang berkurang, aktifitas ekonomi banyak yang dihentikan serta konsumsi masyarakat ikut menurun pula.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku pada 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan. PDRB Tahun 2020 diproyeksikan tumbuh sebesar 145,098,285.31 Juta Rupiah namun mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mencapai 2,27%.

Selain faktor pandemi, Proyeksi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gresik pada periode 2021-2026 mempertimbangkan siklus bisnis. Walaupun fluktuasi business activity telah lama diketahui, yaitu

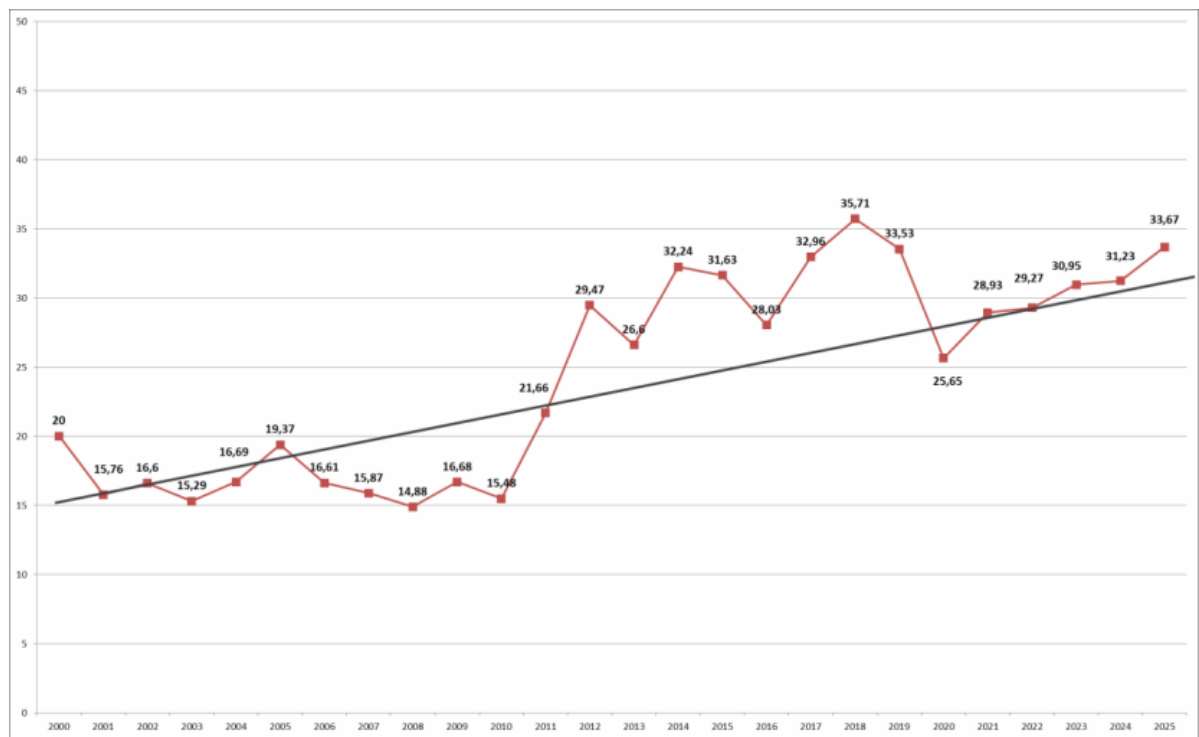
sejak masa merkantilis, namun belum ada pemikir yang mencoba menganalisisnya secara sistematis. Baru pada sekitar Tahun 1890, para heterodox theorists mencobanya. Clement Juglar (1819-1905), tidak membangun business cycles theory secara deduktif, tetapi menggunakan material historis dan statistik ia membangun business cycles theory dengan pendekatan induktif. Kontribusi utamanya adalah pemikirannya bahwa business cycles merupakan suatu hasil yang bukan merupakan akibat kekuatan yang bersumber di luar suatu sistem ekonomi tetapi dari dalam sistem itu sendiri. Menurutnya, business cycles terdiri dari tiga fase yang akan terus menerus berulang, yaitu prosperity (kemakmuran), crisis, dan liquidation.



Gambar 3. 1 Pola Siklus Bisnis

Satu episode *business cycles* dimulai dari *trough* sampai *trough* berikutnya melewati satu *peak*, atau dimulai dari *peak* sampai *peak* berikutnya melewati satu *trough*. Di dalamnya selalu ada fase ekspansi yang terjadi pada banyak aktivitas ekonomi secara bersamaan, juga selalu ada fase kontraksi atau penyusutan. Kedua fase ini silih berganti dari satu siklus ke siklus berikutnya, dan semua siklus berhubungan antara yang satu dengan yang lain, di bagian akhir yang satu dengan bagian awal yang lain. Rangkaian perubahan tersebut berulang kembali tetapi tidak secara periodic atau berkala, satu siklus tidak selalu sama durasi waktunya.

Berdasarkan uraian tersebut, berikut Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik pada periode 2021-2026 sebagaimana berikut:



Gambar 3. 2 Siklus Bisnis Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3. 1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Kabupaten Gresik

No Rekening			Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4			PENDAPATAN DAERAH	6,6%	3.240.372.344.782	3.173.446.300.000	3.361.417.460.000	3.752.477.759.000	4.111.203.953.000	4.507.211.515.000
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7,3%	1.132.301.367.807	1.025.622.200.000	1.085.542.900.000	1.210.016.168.000	1.322.683.151.000	1.451.088.967.000
4	1	01	Pajak Daerah	7,5%	724.000.000.000	660.450.000.000	700.715.000.000	780.464.023.000	853.734.772.000	937.166.630.000
4	1	01 06	Pajak Hotel	15,3%	6.000.000.000	9.000.000.000	9.500.000.000	10.687.004.000	11.576.065.000	12.721.719.000
4	1	01 07	Pajak Restoran	7,7%	27.500.000.000	20.000.000.000	21.000.000.000	23.355.012.000	25.625.198.000	28.093.796.000
4	1	01 08	Pajak Hiburan	23,8%	3.000.000.000	1.200.000.000	2.500.000.000	3.127.904.000	3.420.201.000	3.710.502.000
4	1	01 09	Pajak Reklame	6,4%	4.500.000.000	3.600.000.000	3.800.000.000	4.274.802.000	4.735.663.000	5.300.717.000
4	1	01 10	Pajak Penerangan Jalan		225.000.000.000					
			- PLN	5,5%	206.000.000.000	210.000.000.000	221.600.000.000	246.061.731.000	269.406.595.000	296.840.108.000
			- Non PLN	-9,1%	19.000.000.000	10.000.000.000	10.600.000.000	11.781.770.000	12.891.527.000	14.311.934.000
4	1	01 11	Pajak Parkir	9,5%	6.000.000.000	5.000.000.000	5.250.000.000	5.838.753.000	6.314.218.000	7.421.003.000
4	1	01 12	Pajak Air Tanah	5,3%	1.000.000.000	1.150.000.000	1.215.000.000	1.355.425.000	1.473.318.000	1.590.215.000
4	1	01 13	Pajak Sarang Burung Walet		0	0	0	0	0	0
4	1	01 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28,3%	6.000.000.000	5.000.000.000	5.250.000.000	5.838.753.000	6.314.218.000	6.360.860.000
4	1	01 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6,3%	130.000.000.000	130.500.000.000	140.000.000.000	155.352.534.000	169.957.677.000	186.585.211.000
4	1	01 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10,5%	315.000.000.000	265.000.000.000	280.000.000.000	312.790.335.000	342.020.092.000	374.230.565.000
4	1	02	Retribusi Daerah	13,1%	134.291.000.000	81.820.200.000	86.416.500.000	96.875.522.000	106.044.824.000	115.721.685.000
4	1	02 01	Retribusi Jasa Umum	10,2%	17.550.000.000	18.470.000.000	19.531.000.000	22.811.076.000	24.874.738.000	26.859.128.000
4	1	02 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3,8%	6.000.000.000	7.500.000.000	7.900.000.000	8.400.000.000	9.100.000.000	10.000.000.000
4	1	02 01 01 0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		6.000.000.000					
4	1	02 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	6,2%	800.000.000	800.000.000	850.000.000	910.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000
4	1	02 01 02 0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan		800.000.000					
4	1	02 01 03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		0	0	0	0	0	0

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	1	02	01	04		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	54,4%	4.000.000.000	4.200.000.000	4.500.000.000	6.255.807.000	6.840.402.000	7.421.003.000
4	1	02	01	04	0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		4.000.000.000					
4	1	02	01	05		Retribusi Pelayanan Pasar	7,6%	2.600.000.000	2.000.000.000	2.100.000.000	2.606.587.000	2.841.398.000	3.180.430.000
4	1	02	01	05	0003	Retribusi Kios		2.600.000.000					
4	1	02	01	06		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	8,2%	2.500.000.000	2.500.000.000	2.630.000.000	2.919.377.000	3.209.728.000	3.233.437.000
4	1	02	01	06	0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		2.500.000.000					
4	1	02	01	07		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		0	0	0	0	0	0
4	1	02	01	08		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		0	0	0	0	0	0
4	1	02	01	09		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	4,9%	150.000.000	120.000.000	126.000.000	134.500.000	146.800.000	16.000.000
4	1	02	01	09	0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		150.000.000					
4	1	02	01	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair		0	0	0	0	0	0
4	1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	6,1%	1.500.000.000	1.350.000.000	1.425.000.000	1.584.805.000	1.736.410.000	1.908.258.000
4	1	02	01	11	0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya		1.500.000.000					
4	1	02	01	11	0002	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus		0					
4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha	16,7%	13.238.000.000	9.050.200.000	9.635.500.000	10.630.565.000	11.661.079.000	12.744.271.000
4	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9,3%	9.615.000.000	5.000.000.000	5.300.000.000	5.838.753.000	6.419.455.000	7.102.960.000
4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		20.000.000					
4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		8.140.040.000					
4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan							

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Tanah dan Bangunan							
4	1	02	02	01	0002	Retribusi Penyewaan Tanah	0						
4	1	02	02	01	0003	Retribusi Penyewaan Bangunan		1.004.960.000					
4	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium		200.000.000					
4	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium		150.000.000					
4	1	02	02	01	0007	Retribusi Pemakaian Alat		100.000.000					
4	1	02	02	02		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4,5%	225.000.000	262.000.000	276.000.000	295.000.000	319.000.000	247.000.000
4	1	02	02	02	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan		225.000.000					
4	1	02	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan		18.000.000	0	0	0	0	0
4	1	02	02	03	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan		18.000.000					
4	1	02	02	04		Retribusi Terminal	5,1%	100.000.000	63.200.000	66.500.000	70.750.000	76.200.000	82.850.000
4	1	02	02	04	0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal		100.000.000					
4	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir	16,7%	900.000.000	900.000.000	950.000.000	1.068.701.000	1.168.131.000	1.277.473.000
4	1	02	02	05	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir		900.000.000					
4	1	02	02	05	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir							
4	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan	6,1%	130.000.000	125.000.000	132.000.000	140.500.000	152.400.000	165.800.000
4	1	02	02	07	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan		130.000.000					
4	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	39,3%	2.000.000.000	2.500.000.000	2.700.000.000	2.992.361.000	3.283.393.000	3.604.488.000
4	1	02	02	09	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga		500.000.000					
4	1	02	02	09	0001	Retribusi Pelayanan		1.500.000.000					

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Tempat Rekreasi dan Olahraga							
4	1	02	02	10		Retribusi Penyeberangan di Air	8,1%	250.000.000	200.000.000	211.000.000	224.500.000	242.500.000	263.700.000
4	1	02	02	10	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang		250.000.000					
4	1	02	02	10	0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang		0					
4	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu	13,3%	103.503.000.000	54.300.000.000	57.250.000.000	63.433.881.000	69.509.007.000	76.118.286.000
4	1	02	03	01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14,5%	100.000.000.000	50.000.000.000	52.700.000.000	58.387.530.000	63.984.067.000	70.075.469.000
4	1	02	03	01	0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan		100.000.000.000					
4	1	02	03	03		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum		3.000.000	0	0	0	0	0
4	1	02	03	03	0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum		3.000.000					
4	1	02	03	06		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	5,5%	3.500.000.000	4.300.000.000	4.550.000.000	5.046.351.000	5.524.940.000	6.042.817.000
4	1	02	03	06	0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing		3.500.000.000					
4	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,3%	14.007.000.000	13.052.000.000	13.811.400.000	15.329.365.000	16.830.628.000	18.450.194.000
4	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		14.007.000.000					
4	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		12.007.000.000					

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						(Lembaga Keuangan)							
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank Pasar / Bank Gresik	17,9%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.054.000.000	1.167.751.000	1.278.629.000	1.399.390.000
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank Jatim	5,6%	11.000.000.000	11.000.000.000	11.650.000.000	12.928.668.000	14.206.989.000	15.557.603.000
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) BPR Jatim	14,6%	7.000.000	7.000.000	7.400.000	7.850.000	8.500.000	9.000.000
4	1	03	02	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)		2.000.000.000					
4	1	03	02	02	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Gresik Migas	6,4%	2.000.000.000	1.045.000.000	1.100.000.000	1.225.096.000	1.336.510.000	1.484.201.000
4	1	04				Lain-lain PAD yang Sah	5,7%	260.003.367.807	270.300.000.000	284.600.000.000	317.347.258.000	346.072.927.000	379.750.458.000
4	1	04	02			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		0	0	0	0	0	0
4	1	04	02	01		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah		0	0	0	0	0	0

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	1	04	02	01	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah	0	0	0	0	0	0	0
4	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	110.000.000	0	0	0	0	0	0
4	1	04	03	01		Hasil Sewa BMD	0	0	0	0	0	0	0
4	1	04	03	01	0001	Hasil Sewa BMD	0	0	0	0	0	0	0
4	1	04	03	02		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	110.000.000	0	0	0	0	0	0
4	1	04	03	02	0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	110.000.000	0	0	0	0	0	0
4	1	04	03	03		Hasil dari Bangun Guna Serah	0	0	0	0	0	0	0
4	1	04	03	03	0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	0	0	0	0	0	0	0
4	1	04	03	04		Hasil dari Bangun Serah Guna	0	0	0	0	0	0	0
4	1	04	03	04	0001	Hasil dari Bangun Serah Guna	0	0	0	0	0	0	0
4	1	04	05			Jasa Giro	2,0%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.250.000.000	5.585.000.000	6.000.000.000	6.525.000.000
4	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah		5.000.000.000	0	0	0	0	0
4	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah		5.000.000.000	0	0	0	0	0
4	1	04	07			Pendapatan Bunga	18,3%	25.000.000.000	15.000.000.000	16.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000	22.000.000.000
4	1	04	07	01		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		25.000.000.000					
4	1	04	07	01	0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		25.000.000.000					
4	1	04	16			Pendapatan BLUD		212.821.995.227	0	0	0	0	0
4	1	04	16	01		Pendapatan BLUD		212.821.995.227	0	0	0	0	0
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan BLUD	5,5%	175.000.000.000	200.000.000.000	210.000.000.000	234.592.752.000	255.725.792.000	280.937.960.000
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan BLUD	6,4%	37.821.995.227	33.000.000.000	35.000.000.000	38.838.134.000	42.094.781.000	45.904.203.000
4	1	04	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		0	0	0	0	0	0
4	1	04	17	01		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD		0	0	0	0	0	0
4	1	04	17	01	0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD (Lama HASIL EKSEKUSI		0	0	0	0	0	0

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						ATAS JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME)							
4	1	04	17	01	0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD (Lama HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME)		0	0	0	0	0	0
4	1	04	17	02		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
4	1	04	17	02	0001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
4	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	17.071.372.580	0	0	0	0	0	0
4	1	04	18	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.071.372.580	0	0	0	0	0	0
4	1	04	18	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7,0%	17.071.372.580	17.300.000.000	18.350.000.000	20.331.372.000	22.252.354.000	24.383.295.000
4	2					PENDAPATAN TRANSFER	6,3%	2.037.380.576.975	2.048.524.100.000	2.165.874.560.000	2.416.824.139.000	2.650.976.106.000	2.905.317.171.000
4	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5,4%	1.683.708.411.000	1.739.814.100.000	1.839.814.560.000	2.054.962.211.000	2.254.659.006.000	2.471.199.112.000
4	2	01	01			Dana Perimbangan	6,0%	1.369.765.002.000	1.400.514.100.000	1.482.014.560.000	1.658.083.407.000	1.816.347.103.000	1.990.689.187.000
4	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5,5%	164.741.575.000	193.324.100.000	204.064.560.000	226.337.779.000	247.817.707.000	271.136.847.000
4	2	01	01	01	0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5,4%	27.400.191.000	37.670.000.000	39.730.000.000	44.074.244.000	48.240.619.000	52.837.540.000
4	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 21	5,4%	72.402.009.000	96.500.000.000	101.790.000.000	112.927.738.000	123.695.513.000	135.486.307.000
4	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5,8%	19.134.727.000	16.720.000.000	17.636.000.000	19.563.993.000	21.412.563.000	23.453.549.000
4	2	01	01	01	0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5,6%	28.592.447.000	32.190.000.000	34.100.000.000	37.831.992.000	41.410.741.000	45.374.131.000

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	2	01	01	01	0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	6,5%	14.053.239.000	7.600.000.000	8.016.000.000	8.893.672.000	9.734.418.000	10.612.034.000
4	2	01	01	01	0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	4,7%	27.552.000	33.100.000	35.000.000	37.250.000	40.500.000	44.000.000
4	2	01	01	01	0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent		1.737.805.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	01	0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	4,7%	0	1.561.000.000	1.650.000.000	1.830.450.000	1.999.503.000	2.226.301.000
4	2	01	01	01	0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5,0%	265.286.000	225.000.000	237.350.000	252.540.000	273.850.000	2.985.000
4	2	01	01	01	0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	01	0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	01	0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	5,2%	1.128.319.000	825.000.000	870.210.000	925.900.000	1.010.000.000	1.100.000.000
4	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	6,1%	870.446.047.000	920.000.000.000	975.000.000.000	1.094.766.173.000	1.199.701.243.000	1.314.577.621.000
4	2	01	01	02	0001	DAU		870.446.047.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6,2%	112.568.047.000	69.190.000.000	73.000.000.000	80.908.434.000	88.556.895.000	97.003.107.000
4	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		677.354.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		2.093.500.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		18.098.876.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang		0	0	0	0	0	0

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Pendidikan-Reguler-SLB							
4	2	01	01	03	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		1.273.109.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah		2.500.000.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		2.000.000.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		25.561.703.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		8.618.781.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1.165.830.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan		758.395.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB		7.275.043.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)		797.052.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana		200.000.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-		0	0	0	0	0	0

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)							
4	2	01	01	03	0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan		1.699.842.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		7.700.000.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan		502.234.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan		11.556.272.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan		7.839.899.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan		6.326.665.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan		595.305.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan		5.328.187.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5,7%	222.009.333.000	218.000.000.000	229.950.000.000	256.071.021.000	280.271.258.000	307.971.612.000
4	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD		150.755.383.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		483.000.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD		0	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD		30.453.600.000	0	0	0	0	0

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		2.075.200.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		21.064.391.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		550.883.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		1.900.263.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan		4.111.846.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		6.523.848.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM		390.304.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		2.615.235.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0022	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal		372.462.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		408.918.000	0	0	0	0	0
4	2	01	01	04	00xx	DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan dan Pertanian		304.000.000	0	0	0	0	0
4	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)	-1,6%	26.521.034.000	42.000.000.000	44.300.000.000	49.160.215.000	53.670.846.000	58.837.950.000
4	2	01	02	01		DID		26.521.034.000	0	0	0	0	0
4	2	01	02	01	0001	DID		26.521.034.000	0	0	0	0	0
4	2	01	05			Dana Desa	5,8%	287.422.375.000	297.300.000.000	313.500.000.000	347.718.589.000	384.641.057.000	421.671.975.000
4	2	01	05	01		Dana Desa		287.422.375.000	0	0	0	0	0
4	2	01	05	01	0001	Dana Desa		287.422.375.000	0	0	0	0	0
4	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah	14,6%	353.672.165.975	308.710.000.000	326.060.000.000	361.861.928.000	396.317.100.000	434.118.059.000
4	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil	11,7%	343.137.800.475	249.110.000.000	263.210.000.000	292.109.683.000	319.978.215.000	350.504.561.000
4	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11,7%	343.137.800.475	249.110.000.000	263.210.000.000	292.109.683.000	319.978.215.000	350.504.561.000
4	2	02	01	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16,4%	112.787.800.475	75.250.000.000	79.300.000.000	87.998.348.000	96.318.120.000	105.484.253.000
4	2	02	01	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan	15,2%	63.300.000.000	45.000.000.000	47.500.000.000	52.757.304.000	57.985.561.000	63.502.581.000

No Rekening						Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Bermotor							
4	2	02	01	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11,0%	100.300.000.000	68.500.000.000	72.750.000.000	80.699.907.000	88.346.421.000	96.791.078.000
4	2	02	01	01	0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7,9%	1.250.000.000	760.000.000	810.000.000	901.879.000	989.228.000	1.113.151.000
4	2	02	01	01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6,7%	65.500.000.000	59.600.000.000	62.850.000.000	69.752.245.000	76.338.885.000	83.613.498.000
4	2	02	02			Bantuan Keuangan	5,3%	10.534.365.500	17.600.000.000	18.500.000.000	20.539.899.000	22.520.708.000	24.701.338.000
4	2	02	02	01		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi		0	0	0	0	0	0
4	2	02	02	01	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi		0	0	0	0	0	0
4	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	5,3%	10.534.365.500	17.600.000.000	18.500.000.000	20.539.899.000	22.520.708.000	24.701.338.000
4	2	02	02	02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	5,3%	10.534.365.500	17.600.000.000	18.500.000.000	20.539.899.000	22.520.708.000	24.701.338.000
4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6,1%	70.690.400.000	99.300.000.000	110.000.000.000	125.637.452.000	137.544.696.000	150.805.377.000
4	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		70.690.400.000	0	0	0	0	0
4	3	03	01			Lain-lain Pendapatan		70.690.400.000	0	0	0	0	0
4	3	03	01	01		Pendapatan Hibah Dana BOS		70.690.400.000	0	0	0	0	0
4	3	03	01	01	0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	6,8%	70.690.400.000	99.300.000.000	110.000.000.000	125.637.452.000	137.544.696.000	150.805.377.000
						BELANJA DAERAH	9,39%	3.402.736.962.803	3.441.426.833.500	3.635.003.187.776	4.053.465.280.571	4.502.362.948.353	5.004.443.933.789

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik

Pada Tabel 3.7 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Kabupaten Gresik diatas tampak bahwa :
- Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Rp. 3.240.372.344.782 sedangkan sampai akhir periode Tahun 2026 sebesar Rp. 4.507.211.515.000, sehingga, pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik secara keseluruhan dari Tahun 2021-2026 mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun 6,6%.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Rp. 3.402.736.962.803 sedangkan sampai akhir periode Tahun 2026 sebesar Rp.5.042.972.329.573, sehingga, pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik secara keseluruhan dari Tahun 2021-2026 mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun 9,39%.

Tabel 3. 2 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Kabupaten Gresik

No	Urusan Pemerintahan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDIDIKAN	848.979.055.000	837.837.336.000	867.146.326.000	963.486.345.000	1.074.269.030.000	1.190.403.393.000
2.	KESEHATAN	555.027.582.000	500.130.270.000	500.505.615.000	533.936.457.000	571.456.942.000	653.629.382.000
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	318.971.876.000	390.086.140.000	441.618.501.000	489.070.389.000	452.622.122.000	513.913.281.000
4.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	57.001.086.000	48.260.361.000	58.633.819.000	64.677.333.000	71.928.330.000	80.530.816.000
5.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	36.286.385.000	57.276.693.000	55.993.206.000	49.675.506.000	57.579.376.000	67.163.679.000
6.	SOSIAL	15.855.332.000	13.010.344.000	13.218.136.000	14.267.695.000	15.545.986.000	16.902.729.000
7.	TENAGA KERJA	10.960.277.000	9.611.668.000	10.063.480.000	11.259.292.000	12.655.677.000	14.140.895.000
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.324.721.803	10.247.065.500	3.703.646.776	4.173.988.571	4.684.540.353	4.775.545.789
9.	PANGAN	1.337.591.000	1.044.868.000	1.165.937.000	1.237.382.000	1.395.730.000	1.540.135.000
10.	PERTANAHAN	59.110.359.000	201.903.341.000	193.953.265.000	195.948.439.000	206.935.069.000	167.825.273.000
11.	LINGKUNGAN HIDUP	30.751.496.000	27.885.134.000	31.648.865.000	39.080.619.000	44.449.299.000	48.710.240.000
12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN	8.864.956.000	7.302.350.000	7.616.965.000	8.364.767.000	9.115.579.000	9.809.124.000
13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.606.902.000	15.682.123.000	16.671.014.000	18.739.940.000	22.019.198.000	24.090.414.000
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.365.975.000	12.692.711.000	14.046.877.000	16.460.254.000	19.378.252.000	23.399.760.000
15.	PERHUBUNGAN	33.945.698.000	46.173.208.000	45.967.288.000	54.339.807.000	59.984.369.000	60.560.794.000
16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.654.224.000	22.305.955.000	21.777.667.000	25.656.693.000	32.496.190.000	36.324.570.000
17.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17.845.529.000	15.134.321.000	15.845.734.000	17.728.633.000	19.927.349.000	22.265.944.000
18.	PENANAMAN MODAL	13.717.905.000	11.523.879.000	11.436.800.000	12.333.052.000	13.381.615.000	14.347.399.000

No	Urusan Pemerintahan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	17.211.852.000	33.932.659.000	47.862.020.000	56.845.171.000	61.577.085.000	73.885.220.000
20.	STATISTIK	241.924.000	565.929.000	620.747.000	727.580.000	856.759.000	1.002.890.000
21.	PERSANDIAN	135.478.000	254.325.000	439.751.000	847.314.000	1.693.877.000	3.445.165.000
22.	KEBUDAYAAN	1.762.937.000	3.278.801.000	2.856.388.000	3.421.479.000	3.733.799.000	4.280.776.000
23.	PERPUSTAKAAN	8.533.095.000	7.485.292.000	6.925.792.000	8.117.751.000	9.559.021.000	14.027.523.000
24.	KEARSIPAN	500.104.000	497.720.000	538.138.000	722.104.000	742.741.000	983.894.000
25.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.433.613.000	11.902.917.000	12.793.400.000	14.712.772.000	17.001.281.000	19.489.192.000
26.	PARIWISATA	8.873.063.000	10.293.247.000	10.809.001.000	11.756.363.000	13.068.577.000	14.502.455.000
27.	PERTANIAN	34.253.991.000	30.710.570.000	32.662.819.000	36.807.194.000	41.971.487.000	46.257.347.000
28.	PERDAGANGAN	2.698.285.000	2.288.344.000	2.395.911.000	2.680.610.000	3.013.060.000	3.366.660.000
29.	PERINDUSTRIAN	350.906.000	297.595.000	311.584.000	348.608.000	391.843.000	437.827.000
30.	SEKRETARIAT DAERAH	127,707,858,000	160.605.156.607	164.097.390.607	166.775.439.607	169.479.477.607	172.178.232.607
31.	SEKRETARIAT DPRD	95.566.798.000	84.907.089.000	92.403.549.000	108.334.980.000	158.680.856.000	135.752.756.000
32.	PERENCANAAN	12.495.398.000	11.593.351.000	11.973.651.000	12.851.546.000	14.066.176.000	15.162.842.000
33.	KEUANGAN	791.525.735.000	702.410.522.000	770.448.800.000	903.046.423.000	1.063.378.233.000	1.244.751.663.000
34.	KEPEGAWAIAN	12.584.236.000	11.231.913.000	11.714.246.000	12.339.843.000	13.533.307.000	15.816.611.000
35.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	10.270.431.000	9.565.976.000	9.373.970.000	10.034.805.000	10.890.896.000	11.540.973.000
36.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.024.209.000	608.395.000	580.326.000	633.825.000	695.470.000	758.585.000
37.	PENGAWASAN	96.234.673.000	85.370.118.000	93.800.326.000	109.995.082.000	129.608.555.000	151.716.335.000
38.	KECAMATAN	99.408.401.000	88.331.734.000	97.193.843.000	112.341.997.000	130.701.628.000	151.085.868.000
39.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.317.026.000	9.344.322.000	10.131.605.000	11.567.029.000	14.751.348.000	15.697.624.000

1.1.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan pembangunan dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan menghitung kapasitas riil keuangan daerah. Komponen penghitungan kapasitas riil ini adalah penerimaan daerah serta pengeluaran daerah. Gambaran tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pendapatan	3.240.372.344.782	3.173.446.300.000	3.361.417.460.000	3.752.477.759.000	4.111.203.953.000	4.507.211.515.000
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0	0	0	0	0	0
	Total penerimaan	3.240.372.344.782	3.173.446.300.000	3.361.417.460.000	3.752.477.759.000	4.111.203.953.000	4.507.211.515.000
	Dikurangi:						
4	Belanja Gaji dan Tunjangan	892.897.395.273	906.290.856.202	919.885.219.045	933.683.497.331	947.688.749.791	961.904.081.038
5	Pengeluaran Pembiayaan						
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.347.474.949.509	2.267.155.443.798	2.441.532.240.955	2.818.794.261.669	3.163.515.203.209	3.545.307.433.962

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik

Tabel 3. 4 Proyeksi Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

No	Uraian	Data tahun dasar 2020 (Rp)	Tingkat pertumbu- han (%)	Proyeksi					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo kas neraca daerah	6,190,737,213,029.39	6.34%	6,583,229,952,335	7,000,606,731,314	7,444,445,198,079	7,916,423,023,637	8,418,324,243,336	8,952,046,000,363
	Dikurangi:								
1	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	28,437,693,897.81	-69.61%	19,795,650,237	13,779,871,523	9,592,251,677	6,677,224,245	4,648,056,069	3,235,539,863
2	Kegiatan lanjutan	0		0	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	6,162,299,519,132	75.95%	6,563,434,302,098	6,986,826,859,790	7,434,852,946,402	7,909,745,799,392	8,413,676,187,267	8,948,810,460,500

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik

Kapasitas riil Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Wajib

Pemenuhan belanja wajib sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan meliputi:

- (1) pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (3) pemenuhan Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
- (4) pemenuhan belanja transfer ke Desa sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya;
- (5) ketentuan wajib lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan;

2. Prioritas I : Program Nawakarsa

Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi- Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Rumusan (Sembilan) program prioritas terdiri dari Gresik Akas Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari.

3. Prioritas II : Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutakhiranKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Tabel 3. 5 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik

Uraian	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Belanja wajib	1.516.190.944.400	51 %	1.526.712.955.791	50 %	1.636.888.843.943	50 %	1.810.273.058.727	50 %	1.921.957.668.698	48%	2.179.322.798.998	48%
Pendidikan	848.979.055.000	25 %	837.837.336.000	25 %	867.146.326.000	24 %	963.486.345.000	24 %	1.074.269.030.000	24%	1.190.403.393.000	24%
Kesehatan	430.248.741.400	13 %	343.544.126.791	10 %	371.955.333.943	10 %	403.457.921.727	10 %	439.021.228.698	10%	519.207.132.998	10%
Infrastruktur	230.963.148.000	25 %	339.331.493.000	33 %	391.787.184.000	36 %	437.328.792.000	38 %	402.667.410.000	32%	463.712.273.000	34%
Alokasi Transfer Ke Desa	139.415.966.700		137.508.020.000		145.918.150.000		163.512.626.300		179.065.268.600		196.249.121.700	
Prioritas I	2.010.165.788.803	60,5%	2.225.959.509.500	65,7%	2.417.211.174.776	67,7%	2.692.845.436.571	67,7%	2.921.159.963.353	66,3%	3.371.049.767.789	67,4%
Prioritas II	1.310.465.012.762	39,4%	1.160.940.529.754	34,2%	1.155.650.237.557	32,3%	1.282.780.954.238	32,2%	1.484.073.952.046	33,6%	1.630.592.683.177	32,6%

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat disampaikan sebagai berikut:

- Belanja Wajib terdiri dari Kesehatan, Pendidikan dan Infranstruktur di tahun 2021 Belanja Wajib rencana alokasi sebesar Rp.1.725.897.952.400 (51%) sedangkan alokasi diakhir periode di tahun 2026 sebesar Rp. 2.419.325.656.998.
- Perioritas I dialokasikan untuk mendukung Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) dengan alokasi di tahun

2021 sebesar Rp2.010.165.788.803 (60.5%) sedangkan alokasi sampai akhir periode di tahun 2026 sebesar Rp. 3.371.049.767.789 (67.4%).

- Prioritas II dialokasikan untuk mendukung Program Pembangunan Daerah dengan alokasi ditahun 2021 sebesar Rp 1.310.465.012.762 (39.4%) sedangkan alokasi sampai akhir periode ditahun 2026 sebesar Rp 1.630.592.683.177

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan adalah rangkain prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode Pemerintah Daerah.

Tabel 4. 1 Arah Kebijakan Nasional/Provinsi

No	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang tata cara dan Pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi 3. Permen KUKM RI Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperas 4. Permen KUKM RI Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah oleh Koperasi;	Kewenangan Pembinaan, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

2.	Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan Urusan Perindustrian	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274). 2. Peraturan Perundang-undangan Nomor 20/2016 Tahun 2010 Tentang Merk 3. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 04/MPP/KEP/4/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan IKM serta Pedagang Kecil dan Menengah 4. Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HK.KU.02.02-87 Tanggal 06 Agustus 2018 Tentang Pemberlakuan Sistem Pembayaran PNBPK Kekayaan Intelektual (SIMPAKI). 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2010 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Klaster. 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/2/2010 Tahun 2010 Tentang Pemberian bantuan Peralatan dan atau Mesin. 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas),	Pelayanan fasilitasi Merk dan Halal Penerapan Perindustrian setiap usaha yang sudah mendaftarkan usahanya ke Online Single Submission (OSS) mempunyai kewajiban memenuhi komitmen untuk aktifasi Ijin Usaha Industrinya. Salah satu komitmen tersebut adalah mempunyai akun SIINas
		5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2010 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Klaster. 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/2/2010 Tahun 2010 Tentang Pemberian bantuan Peralatan dan atau Mesin.	
		7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas),	

3	Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan Urusan Perdagangan	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Perdagangan 2. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.	Fasiitasi pengembangan ekspor Penerbitan Dokumen SKA (Surat Keterangan Asal)
		1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang UTP 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTP	Pelayanan penyelenggaraan Metrologi Lega Tera/Tera Ulang

4.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Merujuk pada Permendagri No.86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah

perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran ini harus memberikan kontribusi untuk mendukung visi dan misi

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik telah menetapkan visi pembangunan yang sekaligus menjadi visi pemerintah kabupaten pada periode 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan periode 2021-2026, yaitu:

- (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;
- (2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing Memakmurkan Desa dan Menata kota;
- (3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;
- (4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah;
- (5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Sesuai Tupoksi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) yang ikut bertanggung jawab dalam mendukung **misi ketiga** Kepala Daerah Kabupaten Gresik yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah”**. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan tujuan dari misi ketiga RPJMD 2021-2026 dimana Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan ada di dalamnya yaitu **“Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif”**. Sementara sasaran pembangunan Kabupaten Gresik 2021- 2026 yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah **sasaran ke-enam**, yaitu **“Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor Antar Wilayah”**. Untuk mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik menetapkan tujuan dan sasaran.

Tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pengolaan koperasi, Usaha Mikro dan sebagai pusat promosi dan informasi produk-produk unggulan;
2. Mewujudkan sentra-sentra industri potensial dan meningkatnya unit usaha IMKM yang produktif dengan produk IMKM berbasis inovatif ;
3. Peningkatan sistem distribusi dan Pengawasan Peredaran Barang/Jasa demi terwujudnya Perlindungan Konsumen serta Penguatan sektor ekspor impor.

B. Sasaran

Untuk mewujudkan Koperasi Usaha Mikro serta Industri Perdagangan sebagai penggerak Ekonomi yang Tanggung ditetapkan empat sasaran strategis:

1. Meningkatkan Pengelolaan Koperasi
2. Meningkatnya Usaha Mikro
3. Meningkatnya sistem distribusi perdagangan
4. Meningkatkan dan mengembangkan poroduk-produk kerajinan IKM

Dari masing-masing sasaran tersebut diatas maka ditentukan indikator sasaran

sebagai berikut:

1. Persentase Koperasi aktif
2. Perentase Pertumbuhan Usha Mikro
3. Persentase Pertumbuhan nilai neraca perdagangan
4. Persentase Pertumbuhan IKM

Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Tujuan/Sasaran					
		Target Kinerja					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Presentase Koperasi Aktif	44.17% 625 Kop	44.11% 663 Kop	44.12% 642 Kop	44.20% 642 Kop	44.35% 663 Kop	44.50% 684 Kop
Meningkatnya Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0.09% 150 UM	0.10% 175 UM	0.10% 175 UM	0.10% 175 UM	0.10% 175 UM	0.10% 175 UM
Meningkatnya Sistem Distribusi Usaha Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan US \$	0.03% 1.48178 4.855.0 9 USD	0.04% 1.546.78 9.855.09 USD	1.621.784 .855.09 USD	1.701.784 .855.09 USD	1.786.784 .855.09 USD	1.795.284 .055.09 USD
Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk IKM	Persentase Pertumbuhan IKM	0.79% 7389 IKM	0.81% 7449 IKM	0.83% 7511 IKM	0.87% 7576 IKM	0.92% 7716 IKM	0.97% 7646 IKM

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, selanjutnya adalah dirumuskan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan kebijakan ini merupakan strategi dan kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

4.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Gresik Tahun 2025 telah mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :

Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu :

Visi : ***Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah***

Misi ke 3 : ***Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;***

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik pada tahun 2025 terdapat 3 Urusan 12 program dan 17 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 68.459.776.874,21,-

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 500.000.000,00
2	17	03	2,01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 500.000.000,00
2	17	03	2,01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 500.000.000,00
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 50.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00
2	17	04	2,01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 50.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00
2	17	04	2,01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 500.000.000,00
2	17	04	2,01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 500.000.000,00
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Rp. 1.012.168.012,12	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.012.168.012,12	Rp. 100.000.000,00
2	17	06	2,01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 1.012.168.012,12	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.012.168.012,12	Rp. 100.000.000,00

Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
2	17	06	2,01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00
2	17	06	2,01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.012.168.012,12	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.012.168.012,12	Rp. 50.000.000,00
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Rp. 265.596.979,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 265.596.979,00	Rp. 4.200.000.000,00
2	17	07	2,01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				Rp. 265.596.979,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 265.596.979,00	Rp. 4.200.000.000,00
2	17	07	2,01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 400.000.000,00
2	17	07	2,01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 150.000.000,00	Rp. 500.000.000,00
2	17	07	2,01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 300.000.000,00
2	17	07	2,01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 115.596.979,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 115.596.979,00	Rp. 3.000.000.000,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Rp. 154.766.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 154.766.000,00	Rp. 1.000.000.000,00
2	17	08	2,01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				Rp. 154.766.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 154.766.000,00	Rp. 1.000.000.000,00
2	17	08	2,01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 154.766.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 154.766.000,00	Rp. 400.000.000,00

Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
2	17	08	2,01	0005	Fasilitas Inkubator Usaha Mikro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 600.000.000,00
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 11.768.957.610,44	Rp. 34.749.800,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 11.803.707.410,44	Rp. 12.950.500.000,00
2	17	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 33.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 33.000.000,00	Rp. 61.000.000,00
2	17	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Kebomas, Kedayang		Rp. 18.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 18.000.000,00	Rp. 26.000.000,00
2	17	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.000.000,00	Rp. 35.000.000,00
2	17	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 9.036.227.707,59	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 9.036.227.707,59	Rp. 9.010.000.000,00
2	17	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.031.227.707,59	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.031.227.707,59	Rp. 9.000.000.000,00
2	17	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
2	17	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 474.860.790,61	Rp. 34.749.800,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 509.610.590,61	Rp. 979.500.000,00
2	17	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 35.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 35.000.000,00	Rp. 454.500.000,00
2	17	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.000.000,00	Rp. 200.000.000,00
2	17	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 35.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 35.000.000,00	Rp. 200.000.000,00
2	17	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 354.860.790,61	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 354.860.790,61	Rp. 100.000.000,00

Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
2	17	01	2,06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000,00	Rp. 34.749.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 54.749.800,00	Rp. 25.000.000,00
2	17	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 2.090.669.112,24	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.090.669.112,24	Rp. 2.350.000.000,00
2	17	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.309.112,24	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.309.112,24	Rp. 150.000.000,00
2	17	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.048.360.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.048.360.000,00	Rp. 2.200.000.000,00
2	17	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 134.200.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 134.200.000,00	Rp. 550.000.000,00
2	17	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 90.000.000,00	Rp. 250.000.000,00
2	17	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 44.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 44.200.000,00	Rp. 300.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				Rp. 115.030.356,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 115.030.356,00	Rp. 800.000.000,00
3	30	03	2,01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				Rp. 85.250.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 85.250.200,00	Rp. 500.000.000,00
3	30	03	2,01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 85.250.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 85.250.200,00	Rp. 500.000.000,00
3	30	03	2,02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				Rp. 29.780.156,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 29.780.156,00	Rp. 300.000.000,00

Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
3	30	03	2,02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.780.156,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 29.780.156,00	Rp. 300.000.000,00
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				Rp. 30.540.400,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 30.540.400,00	Rp. 500.000.000,00
3	30	04	2,02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				Rp. 30.540.400,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 30.540.400,00	Rp. 500.000.000,00
3	30	04	2,02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.540.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.540.400,00	Rp. 500.000.000,00
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				Rp. 31.021.680,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 31.021.680,00	Rp. 350.000.000,00
3	30	05	2,01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 31.021.680,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 31.021.680,00	Rp. 350.000.000,00
3	30	05	2,01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 31.021.680,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 31.021.680,00	Rp. 350.000.000,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				Rp. 72.634.899,00	Rp. 19.536.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 92.170.899,00	Rp. 800.000.000,00
3	30	06	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				Rp. 72.634.899,00	Rp. 19.536.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 92.170.899,00	Rp. 800.000.000,00
3	30	06	2,01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 70.630.699,00	Rp. 19.536.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 90.166.699,00	Rp. 500.000.000,00
3	30	06	2,01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.004.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.004.200,00	Rp. 300.000.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Rp. 94.561.041,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 94.561.041,00	Rp. 600.000.000,00

Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN													
3	31	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			Rp. 94.561.041,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 94.561.041,00	Rp. 600.000.000,00
3	31	02	2,01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 94.561.041,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 94.561.041,00	Rp. 600.000.000,00
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			Rp. 8.335.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 8.335.000,00	Rp. 200.000.000,00
3	31	03	2,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			Rp. 8.335.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 8.335.000,00	Rp. 200.000.000,00
3	31	03	2,01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 8.335.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 8.335.000,00	Rp. 200.000.000,00
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			Rp. 8.335.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 8.335.000,00	Rp. 400.000.000,00
3	31	04	2,01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			Rp. 8.335.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 8.335.000,00	Rp. 400.000.000,00
3	31	04	2,01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 8.335.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 8.335.000,00	Rp. 400.000.000,00
Jumlah								Rp. 13.611.946.977,56	Rp. 54.285.800,00			Rp. 13.666.232.777,56	Rp. 23.400.500.000,00

BAB VI PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan rencana kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 tanggal 24 September 2025, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Gresik ini, selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026;
2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di lingkup Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik terkait untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT);
3. Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun yang sama;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program pembangunan dan dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan dalam Renja ini.

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Drs. DARMAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670803 198809 1 003